

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa kajian empiris yang dijadikan sebagai landasan penelitian diantaranya tentang Analisis Proses Pengelolaan Serta Pemanfaatan Dana Desa Di Kec. Damau Kab. Kepulauan Talaud. Adapun Tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan analisis tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan serta pemanfaatan Dana Desa dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hambatan yang dihadapi pada kegiatan pengelolaan dan proses dalam memanfaatkan dana desa, antara adanya kebijakan yang menjadi penghambat terakit dengan susunan birokrasi. Kebijakan yang terkait dengan tahap perencanaan kurang sejalan dengan apa yang menjadi prioritas di desa. Selanjutnya terdapat factor yang menghambat yaitu terbatasnya pengetahuan serta pemahaman, system penyampaian pesan yang tidak mencapai sasaran diantara kepala desa, seluruh staf dan pegawai di kantor desa serta dengan masyarakat setempat. Seharusnya kebijakan turun sebelum diadakanya kegiatan musrembang desa, sehingga ketika muncul beberapa

pendapat dan ide sampai dengan ditetapkan APBDesa akan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.<sup>1</sup>

Penelitian selanjutnya tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana dan apa factor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan pada umumnya proses pengelolaan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Desa Miau Baru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini Nampak pada saat tahap perencanaan, dimana tidak mengikutsertakan masyarakat dan tidak pelaksanaanya tidak melalui forum musyawarah (Musrenbang-Desa), terkait anggaran, temuan peneltian menunjukkan tidak terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan pada tahap perencanaan.<sup>2</sup>

Penelitian lainya tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Usaha untuk Meningkatkan hasi Pembangunan pada Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang. Temuan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuates, menurut teknis pengelolaan dan menurut proses administrasi sudah mengacu pada peraturan. Pemerintah Desa Banyuates telah melakukan tahap pertanggungjawaban dari hasil pengelolaan

---

<sup>1</sup> MARIAM,, 2017. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill 8(2) DOI:10.35800/jjs.v8i2.17420

<sup>2</sup> Kristina Korniti Kila, 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1

Dana Desa dengan benar, hal ini terbukti adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang mencakup Buku Kas Umum, lembar kuitansi, bukti tanda penerimaan, SPP, dan NDP. Pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>3</sup>

### **B. Tata Kelola Keuangan Desa**

Tata kelola keuangan pada tingkat desa merupakan usaha yang dilakukan pemerintah pada pengelolaan desa agar bisa berjalan secara optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa dan aspirasi dari masyarakat desa. Berdasarkan perspektif tentang tata cara pengelolaan keuangan desa di Negara Indonesia tertuang pada UU Desa sebagai berikut:

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa proses pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan desa harus dilakukan dengan mengidentifikasi terkait bagian mana yang berkaitan dengan hak dan mana yang termasuk kewajiban dari pemerintah tingkat desa. Disamping itu, keuangan pemerintah tingkat desa juga meliputi berbagai aspek yaitu sisi pendapatan, sisi pembelanjaan, sisi pengeluaran biaya yang

<sup>3</sup> Sofiyanto., *et al*, 2017, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 71

merupakan bagian yang saling terkait dengan tata cara dalam melakukan pengelolaan keuangan di desa.

Tata cara pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian tahapan yang terdiri tahap merencanakan, tahap melaksanakan, tahap melakukan tata usaha, tahap melaporkan hasil, dan tahap melakukan tanggung jawab keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak serta kewajiban desa yang diwujudkan berupa uang dan semua barang yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pada pengelolaan keuangan di desa dan sebagai wakil pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan yang dimiliki desa yang dipisahkan.<sup>5</sup>

Kepala desa sebagai pengelola keuangan desa dibantu dengan badan yang disebut Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yaitu sekdes, kasi, dan bendahara. Sekdes bertugas melakukan koordinasi dengan semua bagian. Kasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara memiliki wewenang untuk menerima uang, melakukan tugas penyimpanan uang, bertugas melakukan setor dan membayar, melakukan administrasi, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan desa dan pendapatan dari desa, melakukan pengeluaran pendapatan desa yang sesuai tertera pada APB Desa. Bendahara ini dijabat oleh staf dari bagian urusan keuangan.<sup>6</sup>

Tata Cara Pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan suatu instrument yaitu APBDes. APBDes ini dimaknai sebagai:

---

<sup>5</sup> Wiratna, S. V. 2015. Akuntansi Desa, Sebuah Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal 17

<sup>6</sup> Ibid, hal 30

“APBDes adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program dan kegiatan yang dibiayai dengan uang desa. APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.”<sup>7</sup>

Mengacu pada penjelasan yang telah disebutkan di atas, APBDes memiliki sifat teknis, hal ini disebabkan dalam APBDes meliputi berbagai macam program dan bernagai usulan kegiatan yang bersumber dari keuangan desa. APB Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran belanja maupun semua biaya biaya yang dilakukan pemerintah desa setiap tahun. Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pada Pasal 2 disebutkan bahwa :

“keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.”<sup>8</sup>

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka bisa dijelaskan bahwa tata cara pengelolaan keuangan pada tingkat desa pada pelaksanaannya harus didasarkan dengan aspek aspek tata kelola secara umum yang meliputi asas transparansi, asa akuntabilitas, dan asas peran aktif atau partisipasi. Tata cara pengelolaan keuangan pada tingkat desa tidak saja harus dilakukan proses pertanggungjawaban berupa laporan saja, akan tetapi harus secara terbuka terutama akses informasinya yang bisa diakses oleh semua dan juga harus

---

<sup>7</sup> Ibid, hal 33

<sup>8</sup> Yuliansyah & Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat, hal 47

terdapat proses keterlibatan dari masyarakat, mulai dari rencana dan hasil pengelolaan keuangan desa. Aspek aspek tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Transparan

Aspek yang kesatu dalam asas tata cara pengelolaan keuangan desa adalah transparansi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada terbukanya semua informasi yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan keuangan desa.

Hal ini dijelaskan bahwa :

“Transparan berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya”.<sup>9</sup>

Dengan adanya penerapan pada tata kelola keuangan desa yang memenuhi unsur transparansi, semua usaha dalam mengelola keuangan desa akan dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran dari tiap unsur pelaksana yaitu pegawai atau perangkat yang ada di pemerintah desa. Disamping itu, dengan adanya transparansi ini dapat dijadikan sebagai media untuk menjamin keterlibatan dan kebebasan semua lapisan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan desa telah dikelola.

b. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah salah satu bentuk tanggungjawab dari pengelola suatu program dengan cara mengendalikan sumber daya agar pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Arifin, T. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta, 109

dalam mengelola mencapai tujuan sesuai dengan misi yang telah sudah direncanakan di awal. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan berikut ini:

“Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dimana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan <sup>10</sup>

Asas akuntabilitas merupakan suatu tindakan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dari awal hingga akhir proses mengelola keuangan di desa. Asas ini dapat menghambat tindakan yang menyimpang yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh semua orang yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Pada sisi lain, asas akuntabilitas ini akan menjadi pedoman dalam mengelola keuangan pada pemerintahan tingkat desa.

#### c. Asas Partisipasi

Pada proses mengelola keuangan di pemerintahan desa, juga diperlukan adanya keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat. Peran aktif dari masyarakat sebagai perwujudan suatu kewajiban pada dalam tata kelola keuangan di desa, karena dalam menggunakan keuangan harus mampu mengakomodir seluruh keinginan masyarakat. Peran aktif masyarakat juga merupakan suatu bentuk proses demokrasi pada proses mengelola keuangan.

“Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut

<sup>10</sup> Bely D.W, Remon, M., Adrian, P, dan Julia, D.N.S. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hal 35

dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.<sup>11</sup>

Dengan demikian, peran aktif masyarakat ini ditujukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berperan secara aktif pada pengelolaan keuangan, hal ini disebabkan masyarakatlah merupakan unsure yang sangat paham mengenai apa saja masalah yang sebenarnya ada di desanya.

Proses mengelola Keuangan pada pemerintahan desa adalah semua proses tahapan yaitu tahap proses merencanakan, tahap proses melaksanakan, tahap proses melakukan tata usaha, proses memberikan laporan dan tahap proses mempertanggungjawabkan penggunaan uang desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa yang didasarkan atas hak asal usul didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa juga akan mendapatkan dana dari APBD. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagai tugas dari Pemerintah akan didanai dari APBN. Dana yang berasal dari APBN ini disalurkan pada bagian anggaran di pada tiap kementerian maupun yang selanjutnya akan diberikan pada pemerintahan setingkat di bawahnya yaitu kabupaten atau pemerintah kota. Kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimandatkan Pemda akan mendapatkan dana dari APBD. Semua penerimaan dari Desa yang akan diterima tersebut diberikan melalui rekening kas Pemerintah Desa dan untuk penggunaannya harus berdasarkan APB Desa. Sedangkan semua Pencairan

---

<sup>11</sup> Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset, hal 24



dari dana yang ada didalam rekening kas di pemerintaha Desa ini harus sepengetahuan kepala Desa dan Bendahara Desa.<sup>12</sup>

### **C. Pembangunan Desa**

#### **a. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perubahan yang menuju pada tataran yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pelaksanaan Pembangunan ini pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama-sama baik dilaksanakan oleh pemerintah serta harus adanya dukungan dari seluruh golongan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan tingkat kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat yang ada.

Pembangunan merupakan proses serangkaian laju menuju perubahan dimana mengarah pada suatu kemajuan, perubahan yang diharapkan dalam pembangunan ini harus dilakukan melalui proses perencanaan yang mengacu pada aturan tertentu. Pembangunan juga bisa dimaknai suatu serangkaian kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai lepas landas, atau kemungkinan suatu kondisi untuk menuju kematangan.<sup>13</sup>

Pembangunan sebagai suatu tahapan atau semua usaha yang dilakukan secara terencana menuju berbagai perubahan di masyarakat menuju keadaan dan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Desa. bppk.Kemenkeu.go.id

<sup>13</sup> Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga. Penerbit Kencana. Jakarta. Hal 53

<sup>14</sup> Bintoro T.. 200, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, hal 42.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diebutkan di atas, maka yang dimaksud dengan pembangunan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan kesadaran oleh sekelompok golongan masyarakat guna menuju kondisi maupun situasi yang lebih baik dalam segi politik, pada bidang ekonomi, pada bidang sosial dan budaya, bidang Hankam. Tujuan pembangunan secara nasional adalah guna meningkatkan derajat Negara sebagai salah satu bangsa dengan kepribadian dan harga diri, karena dengan adanya pelaksanaan pembangunan secara nasional, bangsa ini telah mengikutsertakan dirinya di pergaulan dunia yang selalu dinamis.

Dengan demikian jelas bahwa suatu pembangunan terdiri dari serangkaian tumbuh kembang dan proses untuk perubahan yang terencana dilakukan melalui kesadaran, masyarakat memiliki keterlibatan penuh pada semua proses baik pada tahap perencanaan, tahap melaksanakan, saat memanfaatkan hasil pembangunan maupun ketika ikut aktif dalam melakukan evaluasi hasil pembangunan.

#### **b. Konsep dan Prinsip Pembangunan Desa**

Sasaran dari pembangunan di desa pada umumnya masih bersifat penanggulangan pada kemiskinan melalui kegiatan investasi infrastruktur dan pemberian pada layanan sosial. Pada tingkat lokal, pembangunan di desa dimanai sebagai pembangunan fisik saja. Yang terjadi sejauh ini belum ada analisis secara menyeluruh dari terhadap pengaruh campur tangan pemerintah, hal ini disebabkan terlalu sering menghitung anggaran saja, bukan pada hasil berupa efisiensi, efektivitas serta keberlanjutan dari semua hasil dari program

pembangunan di desa. Berbagai kebijakan pembangunan di desa lebih tertuju hanya pada jumlahnya saja “yang sudah diberikan” pemerintah, dibandingkan dengan mengawasi hasil akhir secara kualitas, misalnya tindakan tindakan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di pedesaan yang kontinyu melalui pemerintahan desa dengan pemberian otonomi dan penerapan sistem demokrasi.<sup>15</sup>

Pembangunan di desa terkesan hanya sekadar penanggulangan tingkat kemiskinan, bukan pada bagaimana cara memberi pelayanan bidang sosial saja seperti bidang pendidikan dan sektor kesehatan, serta melakukan perubahan fisik desa saja. Pembangunan desa hanya terkesan memberikan kesempatan taraf hidup dari penduduk desa yang tergolong miskin. Pembangunan di pedesaan hanya terkesan multidimensional dengan memberikan pelayanan sosial yang lebih baik, hanya memberikan peluang penduduk desa untuk menggali pendapatan, memperbaiki sarana fisik, memperkuat hubungan bidang sosial, menguatkan kapasitas desa untuk mengelola pemerintahan dan proses pembangunan, menciptakan iklim demokrasi dan politik di desa, serta hanya mengatasi kerentanan sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa.

Perhatian pembangunan di desa didasarkan pada kondisi bahwa lebih dari dua pertiga masyarakat yang tinggal wilayah pedesaan. Selain itu, apabila didasarkan pada sejarah, nampak jelas beda pandangan dalam memandang makna desa antara di negara Indonesia dengan di Negara yang tergolong ‘maju’. Pandangan Negara ‘maju’ desa dianggap sebagai garis belakang

---

<sup>15</sup> The Government of South Africa, 2000. *The Integrated Sustainable Rural Development Strategy*, 2000

sebagai wiyaha yang mendukung kota, akan tetapi di negara Indonesia mulai ratusan tahun yang sila desa hanya dianggap sebagai pusat kehidupan Negara

<sup>16</sup>

Pembangunan desa seharusnya suatu paradigma yang dapat membuat kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik melalui sistem demokrasi yang seharusnya didasarkan dari inisiatif masyarakat desa sendiri.”<sup>17</sup> Proses Pembangunan yang ada di desa seharusnya diarahkan untuk membuat taraf hidup masyarakat desa menjadi lebih sejahtera

Melalu berbagai pendekatan yang terkait dengan pembangunan di pedesaan maka:

- a. Tapap dan pelaksanaan Pembangunan di pedesaaan harus menyentuh senua rakyat Indonesia, mengingat lebih dari 80% penduduk di negara Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.
- b. Proses dan pelaksanaan Pembangunan di pedesaaan terdiri dari semua segi kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non departemen dengan aparatnya di daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>16</sup> Rukminto Adi, Isbandi.2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi.* Hal 292

<sup>17</sup> Beratha, I Nyoman. 2002. *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa.* Ghalia Indonesia, Jakarta

- c. Proses dan pelaksanaan Pembangunan di desa harus mengandung arti hakiki untuk masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas ke seluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya.
- d. Proses dan pelaksanaan Pembangunan di pedesaan sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pada pembangunan tingkat sektoral, pembangunan tingkat regional maupun pembangunan khusus (inpres), kesemuanya diarahkan ke wilayah pedesaan.
- e. Secara prinsip pembangunan di pedesaan tidak saja dilakukan secara sepihak, harus adanya koordinasi dan proses kerjasama dari setiap unsure, baik dari unsure pemerintah tingkat pusat, pemerintah tingkat daerah maupun pada pemerintahan di desa itu sendiri. Pada tataran inilah perlunya inisiatif bahwa, beban dan tanggung jawab pembangunan bukan merupakan tugas yang ringan, justru berhasil atau tidaknya pembangunan di desa akan berdampak langsung kepada kondisi kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia.

